

Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat)

Camelia L. Numberi ¹, Verawati Simanjuntak ², Yubelina Y.H. Mamoribo ³

Febe B. Rumpaisum ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Universitas Papua, Manokwari

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of superior support, clarity of objectives and training on the regional financial accounting system. The research was conducted on 152 respondents in the office of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). The data used is primary data, which was obtained through the distribution of questionnaires. This study uses a quantitative approach and the analysis tool used to test the hypothesis is a multiple linear regression model. The results show that training and superior support had no effect on the regional financial accounting system, while the clarity of objectives had a significant effect on the usability of the regional financial accounting system.

Keywords: *Training, Clarity of Objectives, Supervisor Support, Regional Financial Accounting System.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian dilakukan kepada 152 orang responden yang berada di lingkungan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif serta alat analisis yang digunakan untuk uji hipotesis adalah model regresi linear berganda. Untuk hasil penelitian, ditemukan bahwa pelatihan dan dukungan atasan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan kejelasan tujuan berpengaruh secara signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Kata kunci: *Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.*

*Corresponding Author e-mail: camellia.numberi@gmail.com

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota bertujuan agar pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Melalui penerapan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah mengatur sistem manajemennya secara mandiri. Salah satunya yaitu mampu menghasilkan laporan keuangan yang handal sehingga dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah.

Untuk membuat laporan keuangan yang lebih baik, maka diperlukan sistem informasi pemerintah daerah yang sangat memadai (Wulandari dan Yuliati, 2023). Salah satu caranya yakni dengan menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk membangun sistem informasi pemerintah daerah yang terkomputerisasi. Penegasan inipun tercermin didalam Peraturan Pemerintah (PP) No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 222 yang memberikan penjelasan tentang ketentuan umum terkait Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan PP No.12 Tahun 2019 Pasal 214 dan 215 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat, serta wajib disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

Pengimplementasian sistem baru memerlukan pertimbangan-pertimbangan terkait sumber daya yang diperlukan, kejelasan tujuan, dan rencana strategi yang akan menjadi fokus utama dari seorang manajer atau atasan dalam mendukung sepenuhnya implementasi sistem tersebut. Adanya transisi dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang ada di BPKAD di Provinsi Papua Barat menyebabkan telatnya pencairan anggaran yang merupakan kendala pada penatausaha SIPD. Oleh karena itu, perlunya bimbingan teknis (bimtek) guna memperkuat penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Tentu dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan hasil atas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk dari pertanggung-jawaban pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan para pegawai dalam mengoperasikan sebuah sistem, maka dibutuhkan program pelatihan. Program pelatihan harus ada sasaran yang jelas dan metrik untuk hasil yang dicapai. Pelatihan merupakan suatu kegiatan peningkatan kemampuan pegawai dalam suatu instansi. Pelatihan diharapkan dapat menghasilkan suatu perubahan bagi pegawai khususnya peningkatan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini nantinya akan berdampak pada target atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi (Sedianingsih, dkk., 2020).

Dalam organisasi pemerintah, keberhasilan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah juga dapat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan dapat dilihat dari visi dan misi organisasi. Tujuan organisasi yang jelas akan mempengaruhi tujuan dari individu. Individu yang memiliki kejelasan tujuan dapat melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan kompetensi serta keterampilan yang dimilikinya. Individu di dalam organisasi juga bertanggungjawab atas pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Sehingga ada keterkaitan antara tujuan dari organisasi dan tujuan dari anggota-anggota dalam organisasi.

Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati. Hal ini untuk menghindari terjadinya penolakan terhadap suatu sistem yang baru dikembangkan. Menurut Dewi (2020), dukungan manajemen puncak (atasan) dalam hal inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Dukungan atasan baik berupa motivasi dan penghargaan kepada para pegawainya dapat meningkatkan kinerja dari pegawai.

Untuk hasil penelitian mengenai pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap sistem informasi akuntansi keuangan daerah masih terdapat inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Sedianingsih, dkk. (2020) menemukan dukungan atasan dan pelatihan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Berbeda dengan hasil Zakaria (2022) yang menemukan dukungan atasan dan kejelasan tujuan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan pelatihan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Agustina dkk. (2019) mendapatkan dukungan atasan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian Fadhil, dkk. (2018) menemukan bahwa atasan dan kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi

keuangan daerah, sedangkan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh perilaku organisasi yang diprosikan dengan dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Tujuannya adalah agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya BPKAD Provinsi Papua Barat untuk lebih mengoptimalkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyediakan informasi laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dalam organisasi.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Keperilakuan Organisasi

Perilaku organisasi sebagai pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi (Fadhil, 2018). Sikap seseorang dalam merespon suatu inovasi seperti di implementasikannya sistem akuntansi keuangan daerah dapat berbeda-beda. Perilaku organisasi (*organization behavior*) adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi). Perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur dan proses dalam organisasi (Fadhil, 2018).

Menurut Darmawan (2013), faktor organisasi dalam implementasi sistem meliputi tiga aspek, antara lain:

1. Pelatihan

Pelatihan adalah suatu kegiatan peningkatan kemampuan pegawai dalam suatu institusi. Sehingga pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku bagi pegawai. Pelatihan terkait dengan implementasi, desain, dan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pengguna dalam mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan suatu kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah disemua level organisasi. Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu

keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait.

3. Dukungan Atasan

Dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru dan mengembangkan daya inovatif bawahannya. Sebuah organisasi dapat dikatakan solid bila terjadi hubungan dinamis antara karyawan dengan karyawan lain, serta hubungan harmonis antara karyawan dengan atasan. Aktivitas atau perilaku kerja yang saling mendukung akan membentuk kerja sama tim yang kuat sehingga tujuan yang harus dicapai dapat direalisasikan dengan benar.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran) Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, pengelolaan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Keuangan daerah disebut sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (www.bandungkab.go.id)

Sistem akuntansi pemerintah daerah tingkat pemerintahan diatur oleh Permenkeu, yaitu PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pelaporan Keuangan. Perubahan keuangan daerah untuk Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang ada di Pasal 232 yang mengatur sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomi, efektif efisien, dan akuntabel. Indikator yang digunakan dalam mengukur kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Nurlaela, 2010) sebagai berikut:

1. *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.

2. *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat percaya.
3. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya.
4. Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

Pengembangan Hipotesis

Pelatihan merupakan suatu kegiatan peningkatan kemampuan pegawai dalam suatu institusi, sehingga pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku bagi pegawai. Dengan diadakan pelatihan akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai untuk dapat menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal, sehingga dapat diartikan bahwa dengan adanya peningkatan salah satu faktor keperilakuan organisasi yaitu pelatihan, maka hal ini akan berdampak positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan.

Muhammad (2021) menyatakan keperilakuan organisasi pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sedianingsih (2020) bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

H₁: Pelatihan berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Tujuan organisasi sangat diperlukan oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendala yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arah tertentu. Tujuan dipandang sebagai suatu kesepakatan yang kompleks, yang kadang kala mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan dari anggota organisasi yang dominan. Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Abdiel (2015) menyatakan kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian Ayu, dkk. (2019) ada pengaruh positif dari kejelasan tujuan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi kejelasan tujuan penggunaan suatu sistem demi kelancaran para pegawai dalam bekerja maka semakin tinggi

pemanfaatan/kegunaan SAKD di setiap pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

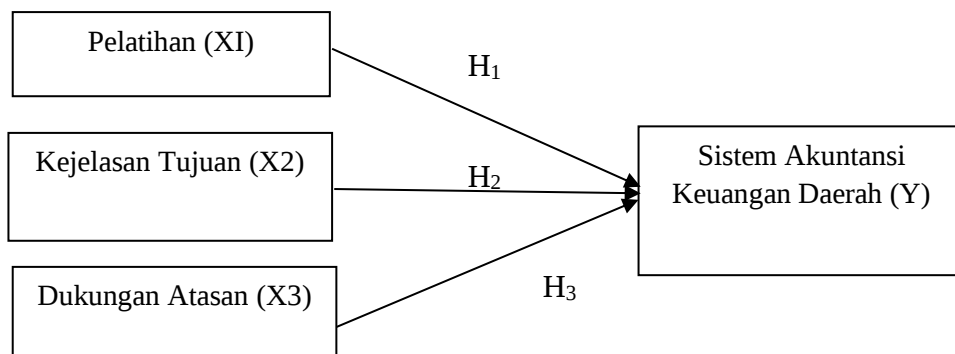
H₂: Kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Dukungan atasan dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Dukungan atasan dalam sebuah instansi pemerintah juga sangat penting dalam menentukan seberapa efektivitas penerimaan informasi dalam organisasi. Dalam hal ini, dukungan atasan dalam bentuk arahan, motivasi, dan pengadaan kegiatan yang dapat menambah kemampuan karyawan dalam menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan penggunaan sistem akuntansi dalam organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulistia dkk. (2017) menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh secara signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian Novie (2017) menyatakan dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Dukungan atasan dalam berbagai aktivitas yang dapat menambah kemampuan organisasi dalam menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan penggunaan sistem akuntansi secara maksimal. Oleh karena itu, dukungan atasan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

H₃: Dukungan atasan berpengaruh positif terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di kantor BPKAD Provinsi Papua Barat, berjumlah 152 orang pegawai. Teknik *sampling* yang digunakan adalah sampel jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Fadhil, 2018).

Tabel 1
Jumlah Penyebaran Dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang disebarkan	152
Kuesioner yang tidak dapat diolah	(36)
Kuesioner yang tidak lengkap	(25)
Total kuesioner yang diolah	91

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada pegawai BPKAD Provinsi Papua Barat yang berjumlah 152 orang pegawai. Untuk skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* dengan skor 1 sampai 5, dengan kategori tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), ragu-ragu (skor 3), setuju (skor 4) dan sangat setuju (skor 5).

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kegunaan sistem akuntansi keuangan

a = Nilai konstanta

b₁b₂b₃ = Koefisien regresi variabel

X₁ = Pelatihan

X2 = Kejelasan tujuan

X3 = Dukungan atasan

e = Standar *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

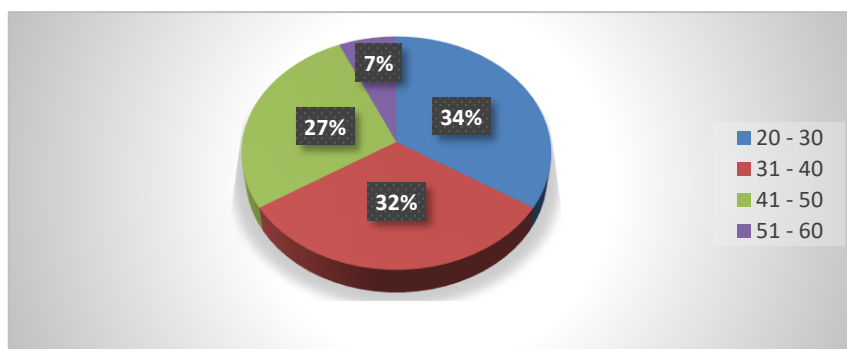
Berikut adalah gambaran umum responden dalam penelitian ini.

Gambar 2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Pada gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 42 orang (46%) dan perempuan sebanyak 49 orang (54%). Jumlah responden terbanyak yaitu berjenis kelamin perempuan.

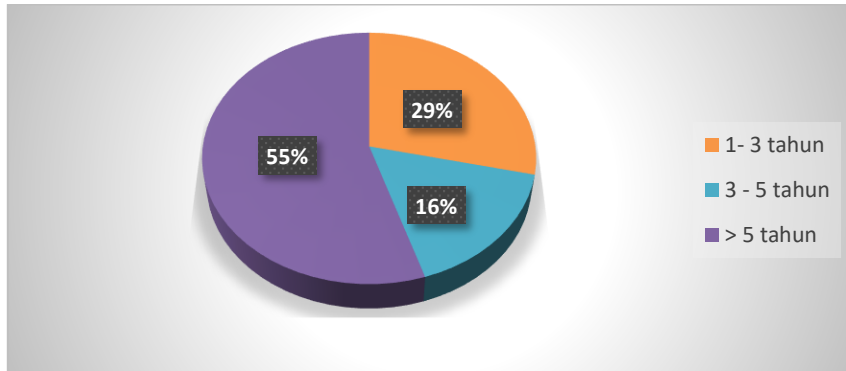
Gambar 3
Responden Berdasarkan Usia



Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa usia responden pada rentang usia 20-30 tahun sebanyak 34% atau sebanyak 31 orang, pada rentang usia 31-40 tahun sebanyak 32% atau sebanyak 29

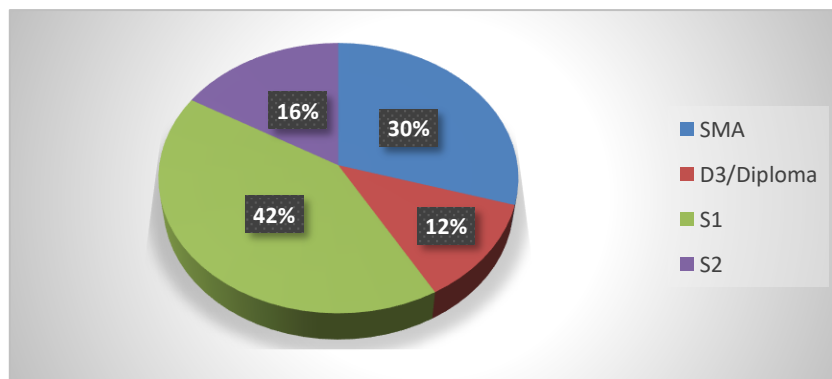
orang, pada rentang usia 41-50 tahun sebanyak 27 % atau sebanyak 25 orang dan untuk rentang usia 51-60 tahun sebanyak 7% atau 6 orang.

Gambar 4
Responden Berdasarkan Lama Bekerja



Dari gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan lama bekerja mulai dari 1-3 tahun sebesar 29% atau berjumlah 26 orang, sedangkan untuk 3-5 tahun berada pada 16 % atau sebanyak 15 orang, dan diatas > 5 tahun besar 55 % atau berjumlah 50 orang.

Gambar 5
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pada gambar 5 di atas, dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 30% atau berjumlah 27 orang, untuk responden D3/Diploma sebanyak 12% atau 11 orang, sedangkan responden S1 sebanyak 42 % atau 38 orang dan jumlah responden S2 sebanyak 15 orang atau sebesar 16 %.

Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std.</i> <i>Deviation</i>	<i>Variance</i>
X1	91	33	50	41.87	3.833	14.694
X2	91	30	50	40.66	4.235	17.938
X3	91	18	30	24.85	2.974	8.843
Y	91	24	40	31.86	3.915	15.324
Valid N (listwise)	91					

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa variabel pelatihan (X1) memiliki nilai minimum sebesar 33 maksimum sebesar 50 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41.87 dan nilai standar deviasi 3.833. Kejelasan tujuan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 30 maksimum sebesar 50 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 40.66 dan nilai standar deviasi 4.235. Dukungan atasan (X3) memiliki nilai minimum sebesar 18 maksimum sebesar 30 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24.85 dan nilai standar deviasi 2.974. Dan pada variabel dependen sistem akuntansi keuangan daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 24 maksimum sebesar 40 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 31.86 dan nilai standar deviasi 3.915.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas penelitian ini.

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		91
Normal Parameters ^{ab}	Mean	0,00000000
	Std.Deviation	2,91252050
Most Extreme Differences	Absolute	0,136
	Positive	0,054
	Negative	-0,136
Test Statistic		0,136

Asymp.Sig (2-tailed)	0,000 ^c
Monte Carlo Sig (2-tailed) Sig	0,060 ^d
95% Confidence Interval Lower Bound	0,055
Upper Bound	0,065

Berdasarkan tabel 3 di atas, uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan signifikansi *Monte Carlo* bahwa semua variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi secara normal karena nilai signifikan *monte carlo* sebesar 0,060 lebih besar dari signifikan yang telah ditetapkan yaitu 0,05.

Uji Multikolinearitas

Berikut adalah hasil uji multikolinearitas penelitian ini.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	0,543	1,841
X2	0,502	1,992
X3	0,648	1,542

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel independent dalam penelitian ini, semuanya memiliki nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*.

Tabel 5
Uji Heterokedastisitas

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-0,722	2,267		-0,318	0,751
	X1	0,127	0,069	0,263	1,850	0,068
	X2	-0,032	0,065	-0,072	-0,487	0,628
	X3	-0,044	0,081	-0,071	-0,542	0,589

Berdasarkan hasil uji *glejser* pada tabel 5 di atas, nilai signifikan semua variabel independen memiliki nilai probabilitas > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 5 di atas maka dapat diperoleh bentuk persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 5,263 + 0,066 X1 + 0,557 X2 + 0,047 X3 + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model yang menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 6
Uji Koefisien Determinan R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,668 ^a	0,446	0,427	2,962

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,427. Artinya bahwa 42,7% variabel kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pelatihan (X1), kejelasan tujuan (X2) dan dukungan atasan (X3) dan sejumlah 57,3% di pengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini membuktikan pelatihan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Provinsi Papua Barat. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan pengujian statistik t (uji t) untuk variabel pelatihan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 0,601 dan nilai signifikan 0,549 dengan nilai *Cronbach Alpha* 0,05 ($0,549 > 0,05$). Maka dapat dikatakan bahwa pelatihan (X1) tidak berpengaruh signifikan sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak.

Hasil pelatihan seharusnya dapat menjelaskan arti pentingnya program pelatihan terhadap seluruh pegawai yang ada untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan di kantor BPKAD Provinsi. Pelatihan langsung dari tenaga ahli yang berpengalaman akan sangat bermanfaat

untuk menambah pengetahuan pegawai dalam menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah. Namun, pelatihan yang diadakan terkait dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah masih sedikit dan juga pelatihan yang diadakan masih belum melibatkan seluruh pegawai di bagian keuangan. Hal ini menyebabkan pelatihan tidak memiliki hubungan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah bagi pegawai. Pelatihan di BPKAD yang terbatas ini menyebabkan pegawai belum memiliki pengetahuan terperinci dalam kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah yang dikembangkan oleh pemerintah. Kurangnya pelatihan juga dapat mempengaruhi kemampuan pegawai dalam menyelesaikan kasus dengan pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini membuktikan kejelasan tujuan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Provinsi Papua Barat. Hasil uji t menunjukkan variabel kejelasan tujuan (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 5,353 dan nilai signifikan 0,000 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan kejelasan tujuan (X2) berpengaruh signifikan sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.

Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintahan dapat dilihat dari visi dan misi organisasi terkait. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas (Kayati, 2006). Oleh sebab itu, semakin tinggi kejelasan tujuan penggunaan suatu sistem demi kelancaran para pegawai dalam bekerja maka semakin tinggi pemanfaatan atau kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di setiap pemerintah BPKAD Provinsi Papua Barat.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini membuktikan dukungan atasan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Provinsi Papua Barat. Hasil perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan uji statistik (uji t) untuk variabel dukungan atasan (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 0,359 dan nilai signifikan 0,720 dengan nilai *Cronbach Alpha* 0,05 ($0,720 < 0,05$) maka dapat disimpulkan dukungan atasan (X3) tidak berpengaruh signifikan sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Dukungan atasan dalam sebuah instansi pemerintah sangatlah penting dalam menentukan seberapa efektivitas penerimaan informasi dalam organisasi serta berkaitan dengan perencanaan hingga penerapan dari peraturan-peraturan baru. Namun tidak semua pimpinan dalam instansi pemerintah dapat memberikan pengarahan dan motivasi yang baik kepada bawahannya, sehingga kesiapan pegawai dalam melakukan pekerjaan masih sangat rendah. Dalam hal ini kurangnya arahan dan dukungan dari atasan terkait pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, misalnya dengan mendapatkan pelatihan,

menyebabkan variabel dukungan atasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelatihan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, Hal ini karena Pelatihan yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah masih kurang dilakukan sehingga kemampuan yang dimiliki pegawai masih terbatas dan membutuhkan waktu penyesuaian terhadap sistem yang baru lebih lama. Pelatihan yang dilakukan belum mengikut sertakan seluruh pegawai pada bidang keuangan.
2. Kejelasan tujuan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Kejelasan tujuan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku organisasi yang berhasil diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Maka semakin tinggi kejelasan tujuan penggunaan suatu sistem demi kelancaran para pegawai dalam bekerja maka semakin tinggi pemanfaatan atau kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di setiap pemerintah BPKAD Provinsi Papua Barat.
3. Dukungan atasan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Kurangnya perhatian dari atasan kepada bawahan dalam bentuk dukungan, maka akan mengurangi rasa percaya diri dan motivasi dari bawahan dalam bekerja. Atasan perlu menunjukkan perilaku berupa dukungan dengan pengarahan dan membantu membangun motivasi, rasa percaya diri, dan memberikan penghargaan bagi setiap pegawai agar mereka dapat meningkatkan tanggungjawab yang telah diberikan.

Keterbatasan

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Dalam penelitian ini teknik pengambilan data hanya menggunakan teknik survei berdasarkan kuesioner, yang mana tidak ada kebebasan bagi reponden dalam menjawab karena mereka hanya menjawab berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, sehingga responden tidak diberikan kebebasan dalam menjawab/memberikan jawaban diluar dari yang diajukan oleh peneliti. Semua jawaban bergantung kepada kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan.
- 2) Hasil pengujian *adjusted r square* (R^2) penelitian ini sebesar 42,7%. Artinya, sejumlah 57,3% variabel independent dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka dibeikan saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penggabungan teknik pengambilan data yaitu teknik survei dan wawancara untuk memperoleh gambaran yang lebih baik.
2. Peneliti selanjutnya dapat menguji variabel lain untuk mengetahui factor lain yang dapat mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, contohnya kompetensi dan sistem pengendalian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina R., Soedjatmiko, dan Zainab (2019). Pengaruh Dukungan Atasan, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia terhadap Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Banjarmasin. *Jurnal Dinamika Ekonomi*, Vol.12, No.2, hal: 375-389.
- Arina M. (2019). Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap Implementasi Sistem Keungan Desa (SISKEUDES) (Studi Kasus Pada Bagian Keungan Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Chenhall, R.H (2004). The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early Implementation of Activity Based Cost Management. *Behavioral Reaserch in Accounting* 16:19.
- Dewi, C.I.R.S., Surya, L.P.L.S dan Yudha, C.K (2020) Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak dan Kejelasan Tujuan Terhadap Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *KRISNA kumpulan Riset Akuntansi*, Vol.11, No.2, hal:110-116.
- D. Darmawan, (2013). Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Surabaya: PT. Jepe Press Media Utama.
- Fadhil M.J, Abdullah Aziz (2018). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Syariah*. Vol 2, No. 2. 288-296.
- Ghozali, Imam (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muhammad, (2021). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa).
- Novie dan Atik, (2017). Faktor-Faktor Keperilakuan Organisasi Yang Mempengaruhi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Kediri. *SEMNAS UII 2017*_370-386.

- Nurlaela, Siti dan Rahmawati, (2010). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. Jurnal SNA XIII.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Khaulia A.T, Dwi, Didik (2019). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. International Journal of Social and Business. Volume 3, No. 4, Tahun 2019, pp. 524-531.
- Sedianingsih, Yunita, Rizky, (2020). Pengaruh Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, Dan Pelatihan Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, Vol.5, No.1, hal: 745-761.
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wati C.H.S, Samuel Batlajery, (2015). Faktor Keprilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Merauke. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume VI No. 1.
- Wulandari, A.D dan Yuniati, A (2023).Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten jembar) Journal Of Economic Business And Accounting, Vol.7, No.1, hal: 637-649.
- Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih, (2017). Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Benefita 2(3) Oktober 2017 (179-193).
- Zakaria, B. (2022). Pengaruh Faktor Keprilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sula) Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK), Vol.4, No.1, hal :10-24.